

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim diperkirakan mulai terjadi pada pertengahan abad ke-20 dan memberikan dampak yang sangat besar terhadap lingkungan.¹ Akibat besarnya dampak yang diberikan, isu perubahan iklim mulai menjadi perhatian global. Hal tersebut mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk membentuk Perjanjian Paris pada Desember 2015. Perjanjian Paris memiliki target menahan kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi di bawah 2°C dibandingkan suhu praindustri dan membatasi kenaikan suhu sebesar 1,5°C.² Selain itu, Perjanjian Paris juga bertujuan untuk meningkatkan tiga hal, yaitu mitigasi emisi, adaptasi terhadap dampak buruk dari perubahan iklim, dan mobilisasi pendanaan.³

Perjanjian Paris memiliki target jangka panjang mengenai pengurangan gas emisi yang disebut dengan *Net Zero Emission*. Target ini harus dicapai oleh seluruh negara dalam upaya menahan kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi pada tahun 2050.⁴ Dalam mendukung mencapai target tersebut, seluruh negara diwajibkan untuk membentuk National Determined Contributions (NDC), yaitu kebijakan berupa janji iklim nasional yang ditetapkan oleh sebuah negara dan harus diperbarui

¹ "What Is Climate Change?," NASA, accessed January 30, 2024, <https://climate.nasa.gov/what-is-climate-change/>.

² Joel Guiot and Wolfgang Cramer, "Climate Change: The 2015 Paris Agreement Thresholds and Mediterranean Basin Ecosystems," *Science* 354, no. 6311 (2016): 465–68, <https://doi.org/10.1126/science.aah5015>.

³ Aslak Brun, "Conference Diplomacy: The Making of the Paris Agreement," *Politics and Governance* 4, no. 3 (2016): 115–23, <https://doi.org/10.17645/pag.v4i3.649>.

⁴ Robert Falkner, "The Paris Agreement and the New Logic of International Climate Politics," *International Affairs* 92, no. 5 (2016): 1107–25, <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12708>.

setiap lima tahun.⁵ Target iklim ini diikuti oleh negara-negara penghasil gas emisi karbon terbesar di dunia dan salah satunya Amerika Serikat. Amerika Serikat berada di peringkat kedua terbesar sebagai negara penghasil gas emisi karbon setelah Tiongkok dengan 5.93 miliar ton CO_2 pada tahun 2021.⁶

Sebagai bentuk kesadaran akan besarnya gas emisi karbon yang dihasilkan, Amerika Serikat berusaha berkomitmen dengan mewujudkan target *Net Zero Emission* di bawah kepemimpinan Joe Biden. Amerika Serikat di bawah pemerintahan Joe Biden membentuk beberapa kebijakan iklim yang ambisius. Pada awal pemerintahannya, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan bergabung kembali ke dalam Perjanjian Paris pada tahun 2021.⁷ Kemudian, Amerika Serikat menetapkan ulang NDC nasional dengan target sebesar 50% pada tahun 2030 dan kebijakan jangka panjang untuk menghilangkan gas emisi dari sektor pembangkit listrik pada tahun 2035 serta mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2025.⁸ Selanjutnya, Amerika Serikat membentuk Build Back Better Act yang merupakan kerangka kerja untuk mencapai tujuan iklim Amerika Serikat, menciptakan lapangan kerja, dan menumbuhkan perekonomian domestik.⁹

Selanjutnya, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden membentuk kebijakan pemberian berbagai bantuan finansial untuk membantu negara

⁵ “What Are NDCs and How Do They Drive Climate Action?,” UNDP, accessed November 9, 2023, <https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/NDCs-nationally-determined-contributions-climate-change-what-you-need-to-know>.

⁶ “Greenhouse Gas Emissions”, Our World in Data, accessed November 18, 2023, <https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions>.

⁷ Daniel Bodansky, “Climate Change: Reversing the Past and Advancing the Future,” *AJIL Unbound* 115 (January 22, 2021): 80–85, <https://doi.org/10.1017/aju.2020.89>.

⁸ Hyeonjung Choi, “President Biden and Climate Change: Policy and Issues,” *SSRN Electronic Journal*, 2021, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3847183>.

⁹ “The Build Back Better Framework,” The White House, accessed March 26, 2024, <https://www.whitehouse.gov/build-back-better/>.

berkembang menanggulangi isu perubahan iklim.¹⁰ Kemudian, Amerika Serikat membentuk U.S Methane Reduction Action Plan yang merupakan kebijakan untuk mengurangi gas metana.¹¹ Selain itu, Amerika Serikat juga menghentikan penyewaan lahan federal dan lepas pantai untuk pengeboran minyak serta gas alam, salah satunya adalah membatalkan kembali proyek pengeboran minyak Keystone XL.¹² Setelah itu, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden mempertemukan 40 pemimpin dunia di dalam Leaders Summit on Climate Change pada April 2021.¹³ Pertemuan ini diadakan untuk menggalang dukungan dunia agar mencapai target iklim yang lebih ambisius.

Kebijakan iklim ambisius yang dikeluarkan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden merupakan bentuk komitmen Amerika Serikat dalam mencapai *Net Zero Emission* dari Perjanjian Paris. Namun, pada 13 Maret 2023, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan menyetujui pelaksanaan Willow Project. Willow Project merupakan proyek pengeboran minyak berskala besar di National Petroleum Reserve, North Pole, Alaska.¹⁴ Pada awalnya, pelaksanaan Willow Project telah disetujui oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald

¹⁰ “FACT SHEET: President Biden to Catalyze Global Climate Action through the Major Economies Forum on Energy and Climate,” The White House, accessed March 27, 2024, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/04/20/fact-sheet-president-biden-to-catalyze-global-climate-action-through-the-major-economies-forum-on-energy-and-climate/>.

¹¹ “Accelerating Progress: Delivering On The U.S. Methane Emissions Reduction Action Plan,” The White House, accessed March 29, 2024, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/12/Methane-Action-Plan-2023-Topper.pdf>.

¹² Mark Elder, “Optimistic Prospects for US Climate Policy in the Biden Administration,” *IGES Briefing Note*, no. February (2021), <https://www.iges.or.jp/en/pub/biden-climate-policy/en>.

¹³ “Leaders Summit on Climate,” [state.gov](https://www.state.gov/leaders-summit-on-climate/), accessed November 9, 2023, <https://www.state.gov/leaders-summit-on-climate/>.

¹⁴ Sarah Amanda, Gladys Azalia, and Yesica Berliana, “Jurnal Panorama Hukum Jurnal Panorama Hukum,” *Politics and Governance* 8, no. 1 (2023): 24–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8794>.

Trump. Akan tetapi, izin pelaksanaan proyek tersebut dicabut oleh Hakim Federal Amerika Serikat karena tidak memenuhi syarat analisis lingkungan dan ketidakjelasan perkiraan gas emisi yang akan dihasilkan proyek ini pada tahun 2020.¹⁵

Rancangan Willow Project muncul pertama kali setelah sebuah perusahaan energi asal Amerika Serikat, yaitu ConocoPhillips menemukan potensi minyak dan gas bumi yang sangat besar di National Petroleum Reserve Alaska pada tahun 2017.¹⁶ ConocoPhillips sendiri telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan pengembangan minyak secara penuh di kawasan tersebut sejak tahun 2009.¹⁷ Proyek ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian penduduk domestik Alaska dan Amerika Serikat dengan potensi pengembangan bernilai miliaran dolar dan dapat memproduksi 180.000 barel minyak per hari.¹⁸ Selain itu, proyek ini dapat menciptakan 2000 lapangan pekerjaan konstruksi, 300 lapangan kerja permanen, memenuhi permintaan energi domestik, dan dapat menghasilkan pendapatan bagi negara hingga lebih dari US\$10 miliar dolar.¹⁹

Namun, Willow Project memiliki dampak negatif yang jauh lebih besar daripada dampak positifnya, terutama dari aspek lingkungan dan iklim global. Proyek ini memberikan dampak yang buruk kepada ekosistem Alaska, mulai dari tercemarnya perairan, polusi udara, terancamnya habitat satwa liar arktik, dan

¹⁵ Adam Vann, "The Willow Project: History and Litigation," 2023, <https://crsreports.congress.gov>.

¹⁶ "Responsibly Developing Alaska's Willow Project," ConocoPhillips, accessed March 6, 2024, <https://www.conocophillips.com/sustainability/sustainability-news/story/responsibly-developing-alaska-s-willow-project/>.

¹⁷ Vann, "The Willow Project: History and Litigation."

¹⁸ "Biden Administration Approves Oil Drilling Project in Alaska despite Environmental Concerns," The Journals, accessed March 7, 2024, <https://www.thejournal.ie/biden-administration-approves-oil-drilling-project-alaska-6018413-Mar2023/>.

¹⁹ Bureau of Land Management, "Support for Willow Project Development," n.d.

kehidupan penduduk suku asli Alaska.²⁰ Selain itu, Willow Project juga dapat mempercepat terjadinya perubahan iklim dan menaikkan suhu rata-rata permukaan bumi. Hal ini disebabkan oleh besarnya gas emisi karbon yang dihasilkan oleh proyek ini yang diperkirakan dapat menghasilkan 9,2 juta metrik ton gas emisi karbon setiap tahunnya.²¹ Jumlah gas emisi tersebut sangat besar hingga mampu mempengaruhi iklim di seluruh dunia.

Di samping itu, besarnya gas emisi yang dihasilkan Willow Project juga dapat mempengaruhi janji iklim nasional Amerika Serikat dan upaya *Net Zero Emission* seluruh dunia. Kemudian, persetujuan atas Willow Project juga mempengaruhi komitmen negara-negara lain untuk menjaga suhu rata-rata global.²² Secara tidak langsung, kebijakan ini sangat berdampak kepada Perjanjian Paris. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat dikecam oleh berbagai pihak baik domestik maupun internasional akibat mengeluarkan kebijakan untuk menyetujui Willow Project. Kemudian, kebijakan ini juga mendapat kecaman keras oleh aktivis dan NGO lingkungan di seluruh dunia karena dampak negatif yang diberikan proyek ini dan ketidaksesuaian Amerika Serikat dengan upaya mencapai target *Net Zero Emission*.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden sangat berupaya untuk mencapai target *Net Zero Emission* dari Perjanjian Paris dengan mengeluarkan berbagai kebijakan iklim yang

²⁰ Timir Basu, "Politics of Cease-Fire," *Frontier*, 2023.

²¹ Adinda Virzilia, "Legal Perspective On Implications Of The 'Willow Project' Ratification" 01, no. 03 (2023): 169–78, <https://doi.org/10.22437>.

²² "Why the Willow Project Is a Bad Idea," NRDC, accessed November 10, 2023, <https://www.nrdc.org/stories/why-willow-project-bad-idea>.

ambisius. Namun, terdapat kebijakan terbaru Amerika Serikat yang tidak sesuai dengan target *Net Zero Emission*, yaitu Willow Project. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dianalisis faktor yang mempengaruhi kebijakan iklim Amerika Serikat terkait *Net Zero Emission* global pada masa pemerintahan Joe Biden.

1.2 Rumusan Masalah

Perjanjian Paris memiliki target pengurangan gas emisi global, yaitu *Net Zero Emission*. Amerika Serikat sebagai negara penghasil gas emisi terbesar di dunia ikut serta dalam mencapai target tersebut. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden sangat berusaha mencapai target *Net Zero Emission* dengan mengeluarkan berbagai kebijakan iklim dan target pengurangan emisi yang lebih ambisius pada tahun 2021. Akan tetapi, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang dapat menghambat upaya untuk mencapai target *Net Zero Emission*, yaitu menyetujui pelaksanaan dari Willow Project. Willow Project merupakan proyek pengeboran minyak berskala besar di Alaska dan dianggap sebagai ancaman terhadap iklim global. Kebijakan ini tentunya sangat mempengaruhi komitmen dan target NDC Amerika Serikat, yaitu janji iklim nasional yang ditetapkan oleh sebuah negara dan harus diperbarui setiap lima tahun. Oleh karena itu, perlu adanya analisis yang lebih lanjut terkait faktor yang mempengaruhi kebijakan iklim Amerika Serikat terkait target *Net Zero Emission* global pada masa pemerintahan Joe Biden.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah “apa faktor yang mempengaruhi kebijakan iklim Amerika Serikat terkait target *Net Zero Emission* global pada masa pemerintahan Joe Biden?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis lebih lanjut terkait faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri terkait isu iklim Amerika Serikat dalam mencapai target *Net Zero Emission* global pada masa pemerintahan Joe Biden.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah kepustakaan dalam kajian Hubungan Internasional, khususnya yang berkaitan dengan analisis faktor yang mempengaruhi kebijakan iklim suatu negara dan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya terkait permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi NGO di bidang lingkungan, seperti Greenpeace, The Nature Conservancy, dan EarthJustice dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan iklim suatu negara dan penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi pembuat kebijakan dalam membentuk kebijakan luar negeri.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa rujukan atau referensi yang digunakan untuk memahami isu lebih dalam. Rujukan pertama, yaitu Willow Project dan Potensi Dampaknya dalam Lingkup Internasional yang ditulis oleh Sarah Amanda, Gladys Azalia, dan Yesica Berliana.²³ Tulisan ini membahas

²³ Sarah Amanda, Gladys Azalia, and Yesica Berliana, "Willow Project Dan Potensi Dampaknya Dalam Lingkup Internasional," *Politics and Governance* 8, no. 1 (2023): 24–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8794>.

mengenai dampak Willow Project di berbagai aspek, seperti internasional, iklim, dan antartika serta menjelaskan Willow Project secara detail.

Kemudian, tulisan ini menjelaskan mengenai latar belakang pembentukan Willow Project. Tulisan ini juga menjabarkan mengenai keuntungan yang diterima Amerika Serikat jika menyetujui Willow Project, seperti meningkatkan pendapatan warga lokal, membuka lapangan kerja, membantu permasalahan minyak nasional, dan menstabilkan perekonomian Amerika Serikat. Selain itu, keputusan Joe Biden menyetujui Willow Project mempengaruhi efektifitas dan upaya untuk mencapai tujuan dari Perjanjian Paris dan indikator SDGs 2030.

Selanjutnya, tulisan ini membahas dampak Willow Project terhadap antartika sebagai tempat eksekusi Willow Project. Willow Project dinilai gagal memenuhi standar analisis lingkungan yang ditetapkan oleh *Environmental Impact Statement* (EIS) dan *National Environmental Policy Act* (NEPA) serta standar terkait perlindungan hewan domestik atau *Endangered Species Act* (ESA). Willow Project akan merusak habitat berbagai spesies hewan endemik baik yang dilindungi maupun tidak. Selain itu, proyek ini juga memberikan dampak negatif kepada penduduk lokal, yaitu Suku Nuiqsut karena dapat mengganggu kesehatan dan sumber pangan mereka.

Rujukan ini membantu penulis dengan memberikan penjelasan tentang Willow Project dan latar belakang disetujuinya Willow Project yang sangat dipengaruhi oleh faktor domestik Amerika Serikat. Selain itu, tulisan ini juga menjabarkan dampak Willow Project di berbagai aspek termasuk dampaknya kepada masyarakat setempat. Kemudian, tulisan ini memberikan pandangan baru

kepada penulis mengenai besarnya pengaruh faktor domestik dalam kebijakan Amerika Serikat.

Perbedaan rujukan pertama dengan tulisan ini adalah rujukan ini hanya menjabarkan tentang faktor domestik yang mempengaruhi sebuah kebijakan, sedangkan tulisan ini memperhatikan semua faktor yang mempengaruhi kebijakan iklim Amerika Serikat. Terdapat kekurangan yang akan diisi oleh penulis melalui tulisan ini, penulis akan memasukkan faktor-faktor pendorong lainnya yang mempengaruhi sebuah kebijakan iklim, seperti faktor internasional dan pengaruh nilai/ide yang dianut pembentuk kebijakan.

Rujukan kedua, yaitu *Appraising the Socio-Political Institutionalism of Climate Change Policy Making in the United States Government: Trends and Prospects* yang ditulis oleh James Balzer.²⁴ Tulisan ini membahas tentang pengaruh norma, praktik, dan keyakinan mengenai perubahan iklim di dalam pemerintahan Amerika Serikat. Selain itu, tulisan ini membahas tentang konsep institusionalisme dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan Presiden Amerika Serikat mulai dari Obama hingga Biden. Menurut tulisan ini, institusionalisme terbagi menjadi dua, yaitu institusionalisme baru dan institusionalisme tradisional.

Institusionalisme baru menjelaskan mengenai pengaruh dari aspek sosial-politik yang lebih luas dan pola perilaku politik mempengaruhi aktor. Institusionalisme baru terbagi menjadi dua, yaitu historis dan sosial. Institusionalisme historis merujuk kepada pola pengambilan kebijakan aktor

²⁴ Jamal Balzer, "Review of European & Transatlantic Affairs," *Politics and Governance* VII, no. 1 (2023): 1–220, https://static1.squarespace.com/static/600a1d923babe5139207aed2/t/6476d0ac70a6b0048321cb0c/1685508331497/Reta_Volume_Vii_Issue_1_Spring_2023.pdf#page=13.

sehingga sulit untuk merubahnya. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan iklim Obama yang sangat berbeda dengan perilaku Amerika Serikat di dalam rezim iklim sehingga mendapatkan banyak kecaman dari dalam pemerintahan Amerika Serikat terutama partai oposisi. Institusionalisme sosiologis percaya bahwa tren dan sentimen sosial di kalangan masyarakat mempengaruhi keyakinan, keputusan, dan perilaku institusi politik. Hal ini menjelaskan keberadaan kaum konservatif iklim di dalam pemerintahan sangat mempengaruhi pengambilan kebijakan Presiden Amerika Serikat.

Selanjutnya, institusionalisme tradisional membahas tentang bagaimana prosedur dan praktik formal dari bagian-bagian pemerintahan, seperti partai politik, dewan kongres, komite kongres, politisi, dan lembaga peradilan mempengaruhi hasil dan keputusan presiden Amerika Serikat. Selain itu, tulisan ini juga menjabarkan kondisi politik dan kebijakan Amerika Serikat terkini terkait isu perubahan iklim serta pengaruh kaum konservatif dan progresif iklim di dalamnya. Institusionalisme sangat mempengaruhi wacana dan perdebatan sosio-politik masyarakat dan politik Amerika Serikat. Hal ini merupakan hasil dari interaksi antara nilai-nilai sosial dan institusional.

Rujukan ini membantu penulis dengan menjelaskan tentang besarnya pengaruh nilai, norma, dan keyakinan dalam kebijakan iklim Amerika Serikat. Selain itu, tulisan ini juga menjabarkan bahwa institusionalisme dapat menjelaskan fenomena kondisi pemerintahan Amerika Serikat yang terbagi menjadi pro dan kontra terkait isu perubahan iklim. Rujukan ini memberikan pandangan baru kepada penulis bahwa banyak lembaga dan aspek yang terlibat dalam kebijakan iklim Amerika Serikat.

Perbedaan rujukan kedua dengan tulisan ini adalah rujukan ini hanya fokus kepada besarnya pengaruh norma dan keyakinan yang dianut para pembuat kebijakan iklim Amerika Serikat, sedangkan tulisan ini memperhatikan semua faktor yang mempengaruhi kebijakan iklim Amerika Serikat. Terdapat ruang yang dapat diisi penulis dalam tulisan ini dengan memasukkan faktor-faktor pendorong lain berupa kepentingan dan kekuatan yang mempengaruhi kebijakan iklim di Amerika Serikat.

Rujukan ketiga, yaitu *The Indispensable Awkward Partner: The United Kingdom and European Climate Policy* yang ditulis oleh Loren R. Cass.²⁵ Rujukan ini membahas dampak kebijakan GCC Inggris terhadap kebijakan luar negeri terkait isu iklim Uni Eropa. Kemudian, Rujukan ini membahas tentang perbedaan norma mengenai lingkungan yang ada di Inggris dengan negara lainnya di Uni Eropa. Selanjutnya, rujukan ini juga menjabarkan tentang kebijakan lingkungan hidup Inggris sangat dipengaruhi oleh kepentingan dan norma-norma politik dalam negeri.

Inggris memiliki norma berupa menekankan pentingnya bukti mengenai dampak negatif dari sebuah polusi sebelum mengambil tindakan terkait hal tersebut. Kemudian, Inggris juga memiliki norma bahwa sebuah komitmen internasional di bidang iklim dapat dicapai tanpa harus mengikuti perjanjian lingkungan hidup internasional. Norma ini seringkali bertentangan dengan norma yang dimiliki negara-negara Uni Eropa, seperti Jerman. Oleh karena itu, Inggris seringkali menghambat negosiasi Uni Eropa terkait iklim. Selanjutnya, Inggris cenderung

²⁵ Paul G Harris, *Europe and Global Climate Change*, ed. Paul G. Harris, *Europe and Global Climate Change* (Edward Elgar Publishing, 2007)

mempromosikan forum internasional untuk perundingan iklim dalam upaya untuk mengekang pengaruh Komisi Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa yang proaktif.

Rujukan ini membantu penulis dengan menjabarkan tentang setiap tindakan yang diambil sebuah negara selalu berdasarkan kepentingan negara tersebut. Kemudian, rujukan ini menjabarkan tentang kebijakan domestik suatu negara dapat mempengaruhi sebuah organisasi regional. Rujukan ini juga membantu penulis dengan menekankan besarnya pengaruh norma yang dianut sebuah negara terhadap kebijakan iklim yang diambilnya. Rujukan ini juga menjabarkan bahwa norma yang dianut sebuah negara dapat mempengaruhi negara lain dan organisasi regional negara tersebut.

Perbedaan rujukan ketiga dengan tulisan ini adalah rujukan ini membahas pengaruh norma yang dianut dan kebijakan yang diambil sebuah negara mengenai iklim terhadap negara lain dan internasional, sedangkan tulisan ini fokus membahas faktor yang mempengaruhi kebijakan iklim sebuah negara yang dipengaruhi oleh sistem internasional dan para pembentuk kebijakannya. Kemudian, rujukan ini fokus membahas kebijakan GCC Inggris dan pengaruhnya terhadap negara lain dan Uni Eropa. Jadi, ruang yang akan diisi oleh penulis adalah adanya faktor lain yang mempengaruhi kebijakan iklim suatu negara selain norma negara tersebut.

Rujukan keempat, yaitu *The Green Party and Germany's Environment: Integration, Influence, and Comparisons* yang ditulis oleh Nitish Kaza dan Ashley Smith.²⁶ Rujukan ini membahas tentang sejarah munculnya kesadaran mengenai

²⁶ Nitish Kaza and Ashley Smith, "The Green Party and Germany's Environment: Integration, Influence, and Comparisons," *Journal of Student Research* 10, no. 4 (March 11, 2023): 352–64.

perlindungan lingkungan dan pengaruh Partai Hijau di Jerman. Menurut rujukan ini, sejarah Jerman sebelum Perang Dunia Kedua dan Nazi memainkan peran yang sangat besar terkait nilai perlindungan lingkungan Jerman dan masyarakatnya. Nazi menyebarkan doktrin mengenai nilai perlunya melindungi lingkungan dan dilanjutkan hingga saat ini. Hal itu menyebabkan nilai perlindungan lingkungan tertanam kuat pada masyarakat serta politik Jerman.

Rujukan ini juga membahas tentang pembentukan Partai Hijau yang juga dilatarbelakangi oleh besarnya nilai perlindungan lingkungan masyarakat Jerman. Kemudian, rujukan ini membandingkan pengaruh Partai Hijau Jerman dan Partai Hijau Amerika Serikat, Partai Hijau Jerman sangat berpengaruh di Eropa dan Jerman. Selain itu, rujukan ini membandingkan gas emisi karbon Jerman dengan Amerika Serikat. Dalam hal ini, gas emisi karbon Jerman lebih sedikit karena pengaruh sejarah dan nilai lingkungan Jerman serta keberadaan partai hijau di Jerman.

Rujukan ini membantu penulis dengan memberikan gambaran bahwa sejarah dan penanaman nilai perlindungan lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar kepada Jerman dalam upaya mencapai target *Net Zero Emission*. Selanjutnya, rujukan ini membantu penulis dengan menjelaskan bahwa Partai Hijau Jerman juga memiliki pengaruh dalam upaya mencapai target *Net Zero Emission*. Dapat ditarik kesimpulan bahwa rujukan ini membantu penulis dengan memberikan gambaran bahwa kelompok politik, masyarakat, dan nilai yang ada di sebuah negara dapat mempengaruhi upaya suatu negara mencapai target *Net Zero Emission*.

Perbedaan rujukan keempat dengan tulisan ini adalah rujukan ini membahas tentang besarnya pengaruh sejarah, penanaman nilai perlindungan lingkungan, dan keberadaan Partai Hijau terhadap upaya dan rendahnya gas emisi karbon yang dihasilkan Jerman, sedangkan tulisan ini akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kebijakan iklim Amerika Serikat terkait target *Net Zero Emission*, yaitu sistem internasional dan para pembentuk kebijakan Amerika Serikat. Jadi, ruang yang akan diisi oleh penulis adalah adanya pengaruh faktor lain, yaitu sistem internasional, partai politik, dan para pembentuk kebijakan dalam kebijakan iklim Amerika Serikat terkait target *Net Zero Emission* pada masa pemerintahan Joe Biden.

Rujukan yang kelima, yaitu *Assessing The Commitment of Indonesian Government Towards Climate Change Policy: The Yudhoyono Presidency 2004-2014* yang ditulis oleh Lidya Christin Sinaga.²⁷ Rujukan ini membahas tentang komitmen Pemerintah Indonesia terhadap upaya mengurangi gas emisi dengan kebijakan iklim pada masa pemerintahan Presiden Yudhoyo. Kemudian, rujukan ini membahas tentang *multi-level governance* yang mempengaruhi kapasitas Pemerintah Indonesia dalam menghadapi perubahan kebijakan iklim. *Multi-level governance* terdiri dari tiga aspek, yaitu internasional, pemerintah daerah, dan NGO lingkungan.

Selanjutnya, rujukan ini membahas tentang Presiden Yudhoyono yang sangat aktif di forum iklim internasional dan pengaruh NGO lingkungan dalam

²⁷ Lidya Christin Sinaga, "Assessing The Commitment of Indonesian Government Towards Climate Change Policy: The Yudhoyono Presidency 2004-2014 [Menilai Komitmen Pemerintah Indonesia Terhadap Kebijakan Perubahan Iklim: Pemerintahan Presiden Yudhoyono 2004-2014]," *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11, no. 2 (December 5, 2020): 163–82

membantu komitmen Presiden Yudhoyono. Rujukan ini juga membahas faktor penghambat komitmen Presiden Yudhoyono, yaitu pemerintah daerah dan desentralisasi. Kemudian, rujukan ini juga menjabarkan beberapa kegagalan Presiden Yudhoyono dalam upaya komitmen iklimnya di sektor domestik. Selain itu, rujukan ini memberikan langkah yang dapat dilakukan Indonesia dalam upaya mengurangi hambatan dan meningkatkan komitmen Pemerintah Indonesia di bidang iklim dan lingkungan.

Rujukan ini membantu penulis dengan menjabarkan peran *multi-level governance* dalam menilai dan mempengaruhi komitmen iklim suatu negara. Selanjutnya, berbagai faktor dapat mempengaruhi komitmen iklim suatu negara, yaitu struktur politik, budaya dan kebijakan, serta komitmen pemimpin. Kemudian, rujukan ini juga membantu penulis dengan menjabarkan bahwa komitmen pemerintah di bidang iklim harus diikuti dengan regulasi dan implementasinya di domestik.

Perbedaan rujukan kelima dengan tulisan ini adalah rujukan ini fokus membahas peran *multi-level governance* dalam menilai dan mempengaruhi komitmen suatu negara, sedangkan tulisan ini fokus menganalisis faktor yang mempengaruhi kebijakan iklim suatu negara. Selanjutnya, tulisan ini akan membahas kebijakan iklim Amerika Serikat terkait target *Net Zero Emission* pada masa Pemerintahan Joe Biden. Jadi, ruang yang akan diisi penulis adalah tulisan ini fokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan iklim Amerika Serikat terkait target *Net Zero Emission* pada masa pemerintahan Joe Biden.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Foreign Policy

Foreign Policy merupakan tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh negara dengan tujuan untuk mengubah perilaku negara lain dan sebagai bentuk penyesuaian di internasional.²⁸ Salah satu teori kebijakan luar negeri yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah teori kebijakan luar negeri yang dijabarkan oleh Paul G. Harris dalam buku yang berjudul *Environmental Change and Foreign Policy: Theory and Practice*.²⁹ Dalam buku ini, Paul G. Harris fokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri terkait isu iklim suatu negara.

Menurut Paul G. Harris, kebijakan luar negeri dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, *power-based* yang dikaitkan dengan pendekatan realisme yang fokus kepada pengaruh hegemoni terhadap suatu negara dan aktor yang paling dominan dalam kebijakan luar negeri, seperti presiden, perdana menteri, NGO, dan politisi. Dalam beberapa kasus, presiden dan perdana menteri memegang otoritas yang lebih besar. Kedua, *interest-based* yang fokus kepada kepentingan dari berbagai kelompok. Menurut *interest-based*, kebijakan luar negeri merupakan hasil perundingan dan tawar-menawar dari berbagai kepentingan. Ketiga, *cognitive approach* yang membahas tentang kebijakan luar negeri suatu negara merupakan respon terhadap perubahan dan informasi baru mengenai suatu hal.

Kemudian, menurut Paul G. Harris, terdapat tiga level dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, terutama kebijakan luar negeri

²⁸ Bojang AS, "The Study of Foreign Policy in International Relations" 6, no. 4 (2018).

²⁹ Paul G. Harris, *Environmental Change and Foreign Policy: Theory and Practice*, ed. Paul G. Harris (New York: Taylor & Francis e-Library, 2009).

terkait isu iklim, yaitu *systemic*, *societal*, dan *state-centric theory*. *Systemic theory* fokus kepada peran sistem internasional dalam membentuk identitas, menentukan kepentingan negara, dan membentuk perilaku sebuah negara. *Societal theory* fokus kepada aktor domestik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri terkait isu iklim. *State-centric theory* fokus kepada negara dan lembaga domestik.

Menurut Paul G. Harris, tiga aspek yang digunakan untuk melihat kebijakan luar negeri suatu negara dapat berada di semua level di atas. Hal tersebut digunakan Paul G. Harris untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri iklim. Berikut teori yang digunakan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri iklim:

1. *Power-based systemic theory*

Power-based systemic theory ini memakai perspektif *power* dari realisme yang disampaikan oleh Morgenthau dengan menganggap kebijakan luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh aktor rasional untuk bertahan hidup, mempertahankan keamanan, dan meningkatkan kekuatan/hegemon serta posisi negara dalam hirarki sistem internasional. Dalam *power-based systemic theory*, negara mengejar kepentingan nasional didefinisikan sebagai *power*. Kemudian, sebuah kebijakan luar negeri dibentuk atas respon terhadap kekuasaan yang ada di sistem internasional dan dipengaruhi oleh perhitungan untuk mencapai keuntungan relatif. Negara bersifat rasional dalam setiap pembentukan kebijakan luar negeri agar mencapai tujuan yang lebih besar.

Kemudian, *power-based systemic theory* menyatakan bahwa posisi suatu negara di dalam sistem internasional membentuk dan mempengaruhi orientasi kebijakannya. Kekuatan yang ada di sistem internasional, seperti adanya kekuatan

hegemoni sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam kebijakan luar negeri terkait isu iklim, hegemoni dan posisi negara dalam sistem internasional sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri terkait isu iklim suatu negara. Jika sebuah negara hegemoni membentuk kebijakan luar negeri terkait isu iklim, maka negara yang kekuatannya lebih rendah dapat membentuk kebijakan yang sama.

Menurut *power-based systemic theory*, isu lingkungan menjadi penting jika isu tersebut memberikan keuntungan relatif dan mempengaruhi kepentingan negara. Bagi negara hegemoni, kebijakan luar negeri terkait isu iklim bertujuan untuk mempertahankan hegemoninya dalam tatanan internasional di bidang lingkungan hidup. Selain itu, negara hegemoni akan membentuk kebijakan luar negeri terkait isu iklim yang sesuai dengan kepentingan ekonominya serta dalam upaya untuk mempertahankan dominasinya di bidang ekonomi. Oleh karena itu, *power-based systemic theory* digunakan untuk menganalisis pengaruh hegemoni dan sistem internasional dalam kebijakan luar negeri terkait isu iklim suatu negara. Kemudian, konsep ini juga digunakan untuk menganalisis mengapa negara suatu negara hegemoni membentuk sebuah kebijakan luar negeri terkait isu iklim.

2. *Power-based Societal Theory*

Power-based societal theory menggunakan pendekatan realisme, pendekatan tersebut melihat kebijakan luar negeri sebuah negara sebagian besar dipengaruhi oleh kelompok hegemoni atau oligopoli dalam upaya mencapai kepentingan yang dimilikinya. Dalam *power-based societal theory*, kelompok hegemoni merupakan partai politik domestik. Menurut teori ini, partai politik domestik menjadi sumber kekuatan dan aktor domestik yang terlibat. Selanjutnya,

partai politik domestik menggunakan pemerintahan sebagai arena konflik, tawar-menawar, dan kompromi kepentingannya. Partai politik selalu memiliki pengaruh dalam setiap kebijakan luar negeri karena memiliki kontrol atas kekuasaan pemerintahan sebagai pihak yang berperan dalam pendanaan kampanye dan pemilihan kandidat pemerintah.

Terkait kebijakan luar negeri terkait isu iklim, partai politik domestik terbagi menjadi dua, yaitu partai yang mendukung perlunya perlindungan iklim dan pembentukan kebijakannya di tingkat tertentu. Kemudian, partai yang hanya fokus kepada aspek ekonomi dan industri tanpa melihat aspek lingkungan. Kemudian, dalam pembentukan kebijakan luar negeri terkait isu iklim, partai politik domestik dapat mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, partai politik domestik yang menentukan kebijakan dan mempengaruhi pembentuk kebijakan. Secara tidak langsung partai politik domestik menyebarkan gagasan yang sesuai dengan kepentingannya ke publik agar masyarakat menuntut pembentukan kebijakan luar negeri terkait isu iklim yang sesuai dengan kepentingan kelompok tersebut. Selain itu, partai politik domestik selalu memberikan kritik terhadap kebijakan iklim sebuah negara karena beberapa kebijakan yang dinilai merugikan.

3. *Power-based state-centric theory*

Power-based state-centric theory mengadopsi pendekatan realisme, pendekatan ini melihat kebijakan luar negeri dibentuk atas distribusi kekuasaan hegemoni di sebuah negara dan perebutan kekuasaan antar lembaga di pemerintahan. *Power-based state-centric theory* menjelaskan tentang dalam menganalisis kebijakan luar negeri terkait isu iklim, maka identifikasi aktor yang

paling dominan dalam kebijakan tersebut. Dalam teori ini, para pembentuk kebijakan merupakan aktor utama dan dapat membentuk sebuah kebijakan terlepas dari pengaruh faktor sistemik dan sosial agar tercapainya tujuan dan kepentingannya. Selain itu, pembentuk kebijakan juga dapat menggunakan wewenang dan kekuasaannya untuk membentuk sebuah kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kepentingannya.

Menurut *power-based state-centric theory*, distribusi kekuasaan dalam pemerintahan dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara, termasuk kebijakan iklim. Dalam negara demokrasi, distribusi kekuasaan tersebut adalah badan eksekutif dan legislatif. Badan eksekutif dan legislatif merupakan pembentuk kebijakan dan aktor utama dalam pembentukan kebijakan luar negeri di suatu negara. Kebijakan tersebut dibentuk setelah perundingan dari berbagai pihak baik eksekutif maupun legislatif, seperti presiden, menteri pertahanan, menteri luar negeri, dewan perwakilan rakyat, dan anggota kongres. Namun dalam kebijakan luar negeri terkait isu iklim, badan eksekutif cenderung menjadi aktor utama. Hal tersebut menyebabkan badan eksekutif mendominasi dan sangat mempengaruhi kebijakan iklim luar negeri suatu negara.

Di samping itu, dukungan dari luar badan eksekutif dan legislatif, seperti kelompok kepentingan di bidang lingkungan hidup atau NGO lingkungan juga memiliki pengaruh dalam kebijakan luar negeri terkait isu iklim suatu negara. NGO lingkungan hidup berfungsi untuk membangun dukungan publik dalam pembentukan kebijakan luar negeri terkait isu iklim. Kemudian, sebuah NGO lingkungan dapat bekerja sama dengan NGO lingkungan lainnya untuk membangun dukungan publik dan mendesak pemerintah untuk membentuk sebuah kebijakan

luar negeri terkait isu iklim. Akan tetapi, NGO lingkungan ini tidak memiliki kewenangan untuk memberikan masukan dalam pembentukan kebijakan luar negeri terkait isu iklim.

Teori kebijakan luar negeri terkait isu iklim yang dijabarkan Paul G. Harris akan membantu penulis dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi kebijakan iklim Amerika Serikat terkait *Net Zero Emission* global pada masa pemerintahan Joe Biden. Mulai dari *power-based systemic theory* untuk melihat pengaruh hegemoni dan sistem internasional dalam pembentukan kebijakan iklim Amerika Serikat pada masa Pemerintahan Joe Biden dari tahun 2021 hingga sekarang. Kemudian, *power-based societal theory* untuk melihat bagaimana pengaruh partai politik domestik dalam kebijakan luar negeri terkait isu iklim Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Joe Biden. Selanjutnya, *power-based state-centric theory* untuk melihat bagaimana pengaruh dan peran para pembentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yaitu badan eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini akan dilihat pengaruh dan peran Presiden Amerika Serikat, yaitu Joe Biden dan Kongres Amerika Serikat sebagai pembentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dalam hal ini juga akan dilihat pengaruh NGO lingkungan dalam kebijakan luar negeri terkait isu iklim Amerika Serikat pada masa Pemerintahan Joe Biden.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif-analisis. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif, menggunakan analisis, dan cenderung

bersifat penemuan.³⁰ Jenis penelitian deskriptif-analisis digunakan untuk menafsirkan masalah yang dikaji secara deskriptif dengan menggunakan analisis dari konsep yang telah dipilih sebelumnya. Jenis dan metode ini dipilih untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai faktor dan alasan yang mendorong Amerika Serikat membentuk kebijakan iklimnya terkait upaya mencapai *Net Zero Emission 2023*.

1.8.2 Batasan Penelitian

Penulis menetapkan batasan untuk penelitian ini agar berpusat dan tidak meluas, batasan yang penulis pilih, yaitu 2021-2024. Tahun 2021 merupakan tahun terpilih Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat dan keluarnya kebijakan bergabung kembali ke dalam Perjanjian Paris serta berbagai kebijakan iklim lainnya, termasuk janji iklim nasional yang ditetapkan oleh sebuah negara. Kemudian, tahun 2024 merupakan tahun kebijakan iklim Amerika Serikat sedang berlangsung.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Sebuah penelitian memiliki unit dan level analisis yang akan menjadi perhatian utama penulis dalam mengidentifikasi permasalahan penelitian. Unit analisis adalah objek penelitian yang akan dianalisis, dijelaskan, dan dideskripsikan sehingga unit analisis bisa disebut dengan variabel dependen.³¹ Unit analisis dari penelitian ini adalah kebijakan iklim Amerika Serikat terkait *Net Zero Emission* global. Kemudian, unit eksplanasi adalah unit yang mempengaruhi dan menjelaskan perilaku dari unit analisis dan bisa disebut dengan variabel

³⁰ Stambol A Mappasere and Naila Suyuti, *Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif, Metode Penelitian Sosial*, vol. 33, 2019.

³¹ Mohtar Mas'ud, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi," 1990.

independen.³² Unit eksplanasi dari penelitian ini adalah masa pemerintahan Joe Biden.

Dalam hubungan internasional terdapat tiga level analisis terhadap aktor internasional, yaitu level sistem internasional yang fokus kepada struktur dan perubahan sistem internasional serta pengaruhnya terhadap aktor, level negara yang fokus kepada faktor internal dan pembuat kebijakan dari sebuah negara, dan level individu yang fokus kepada manusia sebagai aktor pembuat kebijakan.³³ Level analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah level negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data atau informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, dan catatan yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis.³⁴ Penulis memperoleh data dari berbagai sumber, seperti buku Metode Penelitian Sosial yang ditulis oleh Ismail Suardi Wekke, buku studi hubungan internasional yang berjudul Ilmu Hubungan Internasional: Metode dan Disiplin yang ditulis oleh Mochtar Masoed, dan buku konsep analisis kebijakan luar negeri terkait isu iklim sebuah negara yang berjudul *Environmental Change and Foreign Policy: Theory and Practice* yang ditulis oleh Paul G. Harris. Kemudian, artikel jurnal ilmiah, seperti *The Study of Foreign Policy in International Relations* yang ditulis Bojang AS, *Optimistic Prospects for US Climate Policy in the Biden*

³² Mas'ud.

³³ Mas'ud.

³⁴ Milya Sari, "Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA" 6, no. 1 (2020): 41–53.

Administration yang ditulis Mark Elder, *Conference Diplomacy: the Making of the Paris Agreement* yang ditulis Aslak Brun, dan *US-proofing the Paris Climate Agreement* yang ditulis Luke Kemp.

Selain itu, data juga diperoleh dari situs resmi, seperti situs resmi UNDP yang diakses melalui <https://climatepromise.undp.org/>, situs resmi NASA yang diakses melalui <https://climate.nasa.gov/>, dan situs resmi Amerika Serikat yang diakses melalui <https://www.state.gov/>. Selanjutnya, penelitian ini juga memperoleh data dari sumber pendukung, seperti media daring dan situs-situs terkait permasalahan penelitian.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan menata data secara sistematis untuk membentuk pemahaman bagi peneliti terhadap permasalahan yang diteliti dan menyajikan pemahaman tersebut kepada pembaca sebagai temuan. Kemudian, pemahaman yang didapatkan perlu dianalisis lebih lanjut agar mencapai kesimpulan.³⁵ Dalam penelitian ini, penulis memulai analisis data dengan mereduksi data yang berkaitan dengan perubahan iklim, Perjanjian Paris, Target *Net Zero Emission*, Amerika Serikat, Joe Biden dan kebijakannya iklimnya, serta Willow Project. Reduksi data sendiri merupakan proses memilah, menyempitkan, menyederhanakan, dan mengubah data dari berbagai sumber untuk dijadikan rujukan.³⁶

³⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" 17, no. 33 (2018): 81–95.

³⁶ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis, Social Science*, 2nd ed., 1994.

Setelah mereduksi data dari berbagai sumber, penulis menyajikan data tersebut dan ditulis dalam bentuk paragraf. Penyajian data merupakan proses menyajikan data yang sudah terstruktur dan memungkinkan untuk menggambarkan kesimpulan yang akan diambil.³⁷ Penyajian data berguna untuk memahami bacaan dan menganalisis lebih lanjut menggunakan konsep yang ada. Dalam tulisan ini penulis akan menganalisis faktor yang mempengaruhi kebijakan iklim Amerika Serikat terkait *Net Zero Emission* global pada masa pemerintahan Joe Biden menggunakan teori *environmental foreign policy* yang ditulis oleh Paul G. Harris.

Pada bagian awal analisis tersebut, faktor yang mempengaruhi kebijakan iklim Amerika Serikat terkait *Net Zero Emission* global pada masa pemerintahan Joe Biden akan dijelaskan dengan *power-based societal theory*, dalam hal ini akan ditinjau pengaruh partai politik dan kelompok kepentingan domestik terhadap kebijakan iklim Amerika Serikat. Selanjutnya, hal tersebut juga akan dijelaskan dengan *power-based state-centric theory*, dalam hal ini akan ditinjau pengaruh para pembentuk kebijakan domestik terhadap kebijakan iklim Amerika Serikat. Setelah data-data disajikan dan dianalisis menggunakan teori Paul G. Harris, penulis akan melakukan penarikan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian ini.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, batasan

³⁷ Miles and Huberman.

penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II Amerika Serikat dan Agenda Iklim Global *Net Zero Emission*

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai sejarah terbentuknya rezim iklim dunia dimulai dari terbentuknya UNFCCC yang menjadi kerangka dasar kerjasama iklim dunia hingga pembentukan Perjanjian Paris dengan target *Net Zero Emission*-nya. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai Amerika Serikat dan dinamika agenda iklim global.

BAB III Kebijakan Iklim Amerika Serikat Terkait Target *Net Zero Emission* Global

Bab ini dijabarkan kebijakan-kebijakan iklim Amerika Serikat dalam mencapai target *Net Zero Emission* global pada masa pemerintahan Joe Biden. Selain itu, bab ini akan membahas kebijakan iklim Amerika Serikat yang bertolak belakang dengan *Net Zero Emission* global.

BAB IV Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Iklim Amerika Serikat Terkait Target *Net Zero Emission* Global

Bab ini berisi tentang analisis faktor yang mempengaruhi kebijakan iklim Amerika Serikat terkait *Net Zero Emission* global menggunakan menggunakan teori *foreign policy* yang dijabarkan oleh Paul G. Harris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.

BAB V Penutup

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian.